



**GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



**PERATURAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**NOMOR: 64 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2019**



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR                   TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor ..... Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
19. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);

20. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor ..... Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor .....);
23. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 111 Tahun 2018 tentang Tata Cara Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 111);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp. 5.968.673.012.642,25 bertambah sejumlah Rp. 9.458.561.762,40 sehingga menjadi Rp. 5.978.131.574.404,65 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp.	5.663.778.510.743,20
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	50.145.754.759,51
		<hr/>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp.	5.713.924.265.502,71
2. Belanja		
a. Semula	Rp.	5.968.673.012.642,25
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	9.458.561.762,40
		<hr/>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.	5.978.131.574.404,65
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp.	(264.207.308.901,94)
		<hr/>
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp.	485.334.501.899,05
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(12.530.192.997,11)
		<hr/>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	472.804.308.901,94
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp.	180.440.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	28.157.000.000,00
		<hr/>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	208.597.000.000,00
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan	Rp.	264.207.308.901,94
		<hr/>
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	0,00
		<hr/> <hr/>

#### Pasal 2

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran Peraturan ini.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GATOT SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR

**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

Halaman 1

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Pendapatan</b>	<b>5.663.778.510.743,20</b>	<b>5.713.924.265.502,71</b>	<b>50.145.754.759,51</b>	<b>0,88</b>
<b>1.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>1.921.564.734.133,20</b>	<b>2.015.621.583.744,71</b>	<b>94.056.849.611,51</b>	<b>4,67</b>
1.1.1.	Pajak Daerah	1.720.036.541.180,35	1.750.611.839.616,00	30.575.298.435,65	1,75
1.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	33.288.220.925,00	39.977.267.277,00	6.689.046.352,00	16,73
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	85.874.687.657,66	85.997.899.680,29	123.212.022,63	0,14
1.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	82.365.284.370,19	139.034.577.171,42	56.669.292.801,23	40,76
<b>1.2.</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>2.474.160.842.300,00</b>	<b>2.467.472.059.005,00</b>	<b>(6.688.783.295,00)</b>	<b>(0,27)</b>
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	89.553.564.300,00	89.553.564.300,00	0,00	0,00
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	1.351.102.020.000,00	1.351.102.020.000,00	0,00	0,00
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	1.033.505.258.000,00	1.026.816.474.705,00	(6.688.783.295,00)	(0,65)
<b>1.3.</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>1.268.052.934.310,00</b>	<b>1.230.830.622.753,00</b>	<b>(37.222.311.557,00)</b>	<b>(3,02)</b>
1.3.1.	Pendapatan Hibah	8.515.100.000,00	8.520.100.000,00	5.000.000,00	0,06
1.3.4.	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	1.258.831.799.000,00	1.221.604.487.443,00	(37.227.311.557,00)	(3,05)
1.3.5.	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	706.035.310,00	706.035.310,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>5.663.778.510.743,20</b>	<b>5.713.924.265.502,71</b>	<b>50.145.754.759,51</b>	<b>0,88</b>
<b>2.</b>	<b>Belanja</b>	<b>5.968.673.012.642,25</b>	<b>5.978.131.574.404,65</b>	<b>9.458.561.762,40</b>	<b>0,16</b>
<b>2.1.</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>3.186.737.950.794,45</b>	<b>3.177.229.651.873,01</b>	<b>(9.508.298.921,44)</b>	<b>(0,30)</b>
2.1.1.	Belanja Pegawai	1.416.494.422.321,00	1.364.441.675.404,81	(52.052.746.916,19)	(3,81)
2.1.3.	Belanja Subsidi	81.100.523.951,00	81.100.523.951,00	0,00	0,00
2.1.4.	Belanja Hibah	671.906.016.500,00	694.247.916.846,00	22.341.900.346,00	3,22
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	1.402.000.000,00	1.402.000.000,00	0,00	0,00
2.1.6.	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemdes	704.917.367.626,25	736.967.513.631,20	32.050.146.004,95	4,35
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemdes	288.285.076.440,00	289.070.022.040,00	784.945.600,00	0,27
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	22.632.543.956,20	10.000.000.000,00	(12.632.543.956,20)	(126,33)
<b>2.2.</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>2.781.935.061.847,80</b>	<b>2.800.901.922.531,64</b>	<b>18.966.860.683,84</b>	<b>0,68</b>
2.2.1.	Belanja Pegawai	292.934.140.331,80	287.507.837.632,80	(5.426.302.699,00)	(1,89)
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.341.878.364.015,00	1.410.390.346.134,84	68.511.982.119,84	4,86
2.2.3.	Belanja Modal	1.147.122.557.501,00	1.103.003.738.764,00	(44.118.818.737,00)	(4,00)
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>5.968.673.012.642,25</b>	<b>5.978.131.574.404,65</b>	<b>9.458.561.762,40</b>	<b>0,16</b>
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(304.894.501.899,05)</b>	<b>(264.207.308.901,94)</b>	<b>40.687.192.997,11</b>	<b>(15,40)</b>
<b>3.</b>	<b>Pembiayaan</b>	<b>304.894.501.899,05</b>	<b>264.207.308.901,94</b>	<b>(40.687.192.997,11)</b>	<b>(15,40)</b>
<b>3.1.</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>485.334.501.899,05</b>	<b>472.804.308.901,94</b>	<b>(12.530.192.997,11)</b>	<b>(2,65)</b>
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	485.334.501.899,05	471.794.246.868,94	(13.540.255.030,11)	(2,87)



Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
3.1.7.	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0,00	1.010.062.033,00	1.010.062.033,00	100,00
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>485.334.501.899,05</b>	<b>472.804.308.901,94</b>	<b>(12.530.192.997,11)</b>	<b>(2,65)</b>
<b>3.2.</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>180.440.000.000,00</b>	<b>208.597.000.000,00</b>	<b>28.157.000.000,00</b>	<b>13,50</b>
3.2.2.	Penyertaan Modal ( Investasi ) Pemerintah Daerah	180.440.000.000,00	208.597.000.000,00	28.157.000.000,00	13,50
	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>180.440.000.000,00</b>	<b>208.597.000.000,00</b>	<b>28.157.000.000,00</b>	<b>13,50</b>
	<b>PEMBIAYAAN NETO</b>	<b>304.894.501.899,05</b>	<b>264.207.308.901,94</b>	<b>(40.687.192.997,11)</b>	<b>(15,40)</b>
<b>3.3</b>	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

**HAMENGKU BUWONO X**